

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	16
2. Bentuk Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan tentang Hubungan Industrial	
1. Pengertian Hubungan Industrial	19
2. Unsur-Unsur Hubungan Industrial	20
3. Sarana Pelaksanaan Hubungan Industrial	21
C. Tinjauan tentang Hubungan Kerja	
1. Pengertian Hubungan Kerja	31
2. Unsur-Unsur Hubungan Kerja	32
3. Pihak Dalam Hubungan Kerja	34
4. Pelaksanaan Hubungan Kerja	38
5. Berakhirnya Hubungan Kerja	41
D. Tinjauan tentang Pengupahan	
1. Pengertian Upah dan Pengupahan	42
2. Prinsip Pengupahan	44
3. Teori Pengupahan	45
4. Komponen Upah	46
5. Dasar-Dasar Penetapan Upah	46
6. Formula Penghitungan Upah di Indonesia	50

E.	Tinjauan tentang Keberlanjutan Bisnis	
1.	Keberlanjutan Bisnis	51
2.	Pengertian Bisnis	52
3.	Hubungan Upah Pekerja Terhadap Keberlanjutan Bisnis	54
BAB III	METODE PENELITIAN	58
A.	Tipe Penelitian	58
B.	Sifat Penelitian	58
C.	Jenis Penelitian	59
D.	Metode Analisis Data	64
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A.	Penerapan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di Kabupaten Bandung	
1.	Hasil Penelitian	65
2.	Pembahasan	72
B.	Perlindungan terhadap hak upah pekerja dan keberlanjutan bisnis pelaku usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di Kabupaten Bandung	
1.	Hasil Penelitian	85
2.	Pembahasan	94
BAB V	PENUTUP	118
A.	Kesimpulan	118
B.	Saran	119
	DAFTAR PUSTAKA	120
	LAMPIRAN	123

DAFTAR SINGKATAN

APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
DPC	Dewan Pimpinan Cabang
DPK	Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota
DISNAKER	Dinas Tenaga Kerja
KADISNAKER	Kepala Dinas Tenaga Kerja
KEPRES	Keputusan Presiden
KEPMENNAKER	Keputusan Menteri Tenaga Kerja
KHL	Kebutuhan Hidup Layak
MENNAKER	Menteri Tenaga Kerja
PERMENNAKER	Peraturan Menteri Tenaga Kerja
PERMENNAKERTRANS	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PP	Peraturan Pemerintah
PPHI	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
PKB	Perjanjian Kerja Bersama
PK	Perjanjian Kerja
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
SPN	Serikat Pekerja Nasional
UMP	Upah Minimum Provinsi
UMSP	Upah Minimum Sektoral Provinsi
UMK	Upah Minimum Kabupaten/Kota

UMSK	Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Lampiran II	Panduan Wawancara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung
Lampiran III	Panduan Wawancara Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bandung
Lampiran IV	Panduan Wawancara Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung